

Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

¹ Aisyah Rahmadani, ² Reva Nurputri Siahaan, ³ Nazwa Aulia Nst, ⁴ Putri Kemala Dewi Lubis, ⁵ Khairani Alawiyah Matondang, ⁶ Afifah Khalisah Ritonga
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan, Medan

E-mail: ¹ aisyah.7252540011@mhs.unimed.ac.id,

² revanputrii.7253240011@mhs.unimed.ac.id,

³ najwa.7253240033@mhs.unimed.ac.id, ⁴ putrikemala@unimed.ac.id,

⁵ alawiyah@unimed.ac.id, ⁶ afifahkhalii.7253240004@mhs.unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan studi literatur. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023 dan 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Realisasi anggaran yang mendekati target serta capaian indikator kinerja yang sebagian besar memenuhi bahkan melampaui target menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti permasalahan validasi data, peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan sistem data, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan koordinasi lintas sektor.

Kata kunci : penganggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, efektivitas anggaran, kinerja organisasi, dinas Kesehatan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting at the Medan City Health Office and to identify the challenges and solutions in its implementation. The research method used is descriptive with a quantitative approach and literature study. The data were obtained from the Performance Accountability Reports (LKjIP) of the Medan City Health Office for 2023 and 2024. The results indicate that the implementation of performance-based budgeting has been relatively effective, as reflected in the alignment between planning, implementation, and performance reporting. The budget realization, which is close to the target, along with the achievement of key performance indicators that mostly meet or exceed the targets, demonstrates efficiency and effectiveness in budget management. However, several challenges remain, including data validation issues, population growth, limited human resources, and low public understanding of the healthcare system. Therefore, continuous improvements are required through better planning quality, strengthening data systems, human resource development, and optimizing the use of information technology and cross-sector coordination.

Keyword : *performance-based budgeting, accountability, budget effectiveness, organizational performance, health office*

1. PENDAHULUAN

Anggaran adalah rencana keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan reformasi. Pengelolaan belanja publik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, dan adanya audit eksternal. Reformasi ini ditandai dengan diberlakukannya paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang ingin dicapai, maka implementasi penganggaran berbasis kinerja (PBK) dimulai (Undang-Undang RI, 2003). Namun, PBK baru dapat dilaksanakan secara penuh pada tahun 2011 karena adanya format baru indikator kinerja dalam dokumen anggaran seperti Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Menurut PP No 90 Tahun 2010, penganggaran berbasis kinerja (PBK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran publik. Atas dasar pemikiran dimaksud, penulis berpendapat bahwa kualitas anggaran publik tercapai apabila: (1) pengeluaran negara dilakukan secara efisien dan efektif (operational efficiency); (2) akuntabilitas keuangan publik meningkat, dan (3) tercapai transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Untuk mencapai kualitas anggaran, perlu diperoleh informasi dan fakta kinerja sebagai alat yang digunakan dalam penetapan pengalokasian anggaran (OECD 2007).

Konsep penganggaran berbasis kinerja ini tentu menjadi harapan baru dalam berlangsungnya kegiatan keuangan agar berjalan secara efektif dan efisien. Anggaran berbasis kinerja lahir sebagai salah satu perbaikan terhadap

proses penganggaran tradisional yang masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan anggarannya, seperti belum terdapatnya tolak ukur kinerja yang baku dalam pelaksanaannya. Konsep penganggaran berbasis kinerja atau biasa disebut dengan performance-based budgeting merupakan suatu konsep penganggaran yang berorientasi pada output organisasi. Dengan adanya penyusunan anggaran berbasis kinerja ini diharapkan adanya peningkatan efisiensi pengalokasian sumber daya dan adanya efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup pemerintahan Kota Medan yang telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan urusan keuangannya. Lebih lanjut, dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 terdapat persentase minimum yang harus dipenuhi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggarannya. Adapun persentase minimum yang harus dipenuhi yaitu sebesar 95% dari anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya.

2. METODOLOGI

Jurnal ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan metode studi literature. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data numerik atau angka yang diperoleh dari objek penelitian. Sedangkan, studi literature digunakan untuk mengumpulkan dan meriset tentang jurnal, artikel, buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini juga melihat tahun survei, dimulai dengan yang terbaru dan secara bertahap kembali ke tahun sebelumnya untuk melihat perbandingan anggaran yang terjadi pada Dinas Kesehatan kota

Medan. Dari metode ini, peneliti mengetahui berapa anggaran yang terealisasi dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN di Dinas Kesehatan kota Medan. Sehingga, hal ini mencerminkan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan akuntabel..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan dalam proses penganggaran dalam pemerintahan Indonesia. Pendekatan ini digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pemerintah, karena dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja berarti ada tolak ukur kinerja yang di tergetkan oleh pemerintah. Di Indonesia, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dilaksanakan penuh mulai pada tahun 2011 dan sampai sekarang ini. Oleh karena itu, Dinas Kementerian Kesehatan juga sudah menerapkan PBK. Hal ini didorong karena adanya kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penganggaran berbasis kinerja untuk efektivitas anggaran, terutama terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang disahkan pada 30 April 2008 dan berlaku 30 April 2010, menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik. UU ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mengetahui apakah penerapan PBK berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukannya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Realisasi anggaran menunjukkan seberapa besar masukan (input), keluaran (output), serta hasil (outcome) yang diperoleh dari Uni Kerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Tabel dibawah ini merupakan Data Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) di Dinas Kesehatan Kota Medan.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2023-2024

Tahun	APBN	Realisasi	Selisih
2023	Rp. 1.088.854.102.135,00	Rp. 956.931.863.412,00	Rp. 131.922.238.723,00
2024	Rp. 1.005.173.124.112,00	Rp. 947.162.150.494,00	Rp. 58.010.973.618,00

Sumber data: LKJIP Dinas Kesehatan Kota Medan 2024

Berdasarkan tabel yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Kesehatan Kota Medan menunjukkan tren pengelolaan keuangan yang semakin optimal pada periode 2023 hingga 2024. Selisih anggaran pada tahun 2023 tercatat cukup besar, yaitu sebesar Rp131.922.238.723,00. Angka ini merupakan hasil dari anggaran yang diterima sebesar Rp1.088.854.102.135,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp956.931.863.412,00.

Pada tahun 2024, selisih anggaran mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp58.010.973.618,00. Penurunan selisih ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perencanaan keuangan di tahun 2024 dilakukan dengan lebih presisi. Meskipun anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp1.005.173.124.112,00, namun realisasi belanjanya tetap terjaga di angka yang maksimal yaitu sebesar Rp947.162.150.494,00.

Hal tersebut membuktikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengalokasikan APBD dengan baik dan sesuai dengan pedoman penganggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat fluktuasi nominal anggaran antara tahun 2023 dan 2024, namun kemampuan dinas dalam menekan selisih anggaran pada tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Medan masuk dalam kategori efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah serta berhasil menyinergikan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja ini tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran secara nominal, tetapi juga pada pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dapat dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah (Renstra), dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM-Kesehatan). Cara ini dapat dilakukan untuk evaluasi internal dan menganalisis atas keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Tingkat capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,83	0,83	100,00
		Persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	99%	98,96	99,96
		Prevalensi Stunting	0,15%	0,12%	120,00
		Persentase Pencapaian	88%	90,08%	102,32

		an indeks pelayanan SPM Bidang Kesehatan			
		Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS)	80 %	92,05 %	115,06
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,44	107,76
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	B B (71)	B (62,75%)	88,38

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, Pada tahun anggaran 2024, Dinas Kesehatan Kota Medan menunjukkan performa akuntabilitas yang signifikan melalui pencapaian beberapa sasaran strategis. Salah satu indikator keberhasilan yang menonjol adalah tercapainya Indeks Kesehatan sebesar 0,83 (100% dari target) serta peningkatan kualitas layanan publik yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai nilai 89,44, masuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian ini menegaskan bahwa penggunaan anggaran

telah dikelola untuk memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, efektivitas penganggaran berbasis kinerja terlihat jelas pada keberhasilan program-program prioritas. Dinas Kesehatan Kota Medan mencatat capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,96% dan penurunan prevalensi stunting hingga ke angka 0,12%, yang mana hasil ini melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian keuangan yang dilakukan bukan sekadar untuk menghabiskan pagu anggaran, melainkan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menghasilkan *outcome* kesehatan yang maksimal.

Meskipun secara manajemen sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) saat ini berada pada predikat B dengan nilai 62,75, Dinas Kesehatan Kota Medan terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan. Fokus utama dalam rencana tindak lanjut meliputi optimalisasi analisis laporan kinerja agar lebih mendalam dalam menyajikan data, serta penguatan evaluasi kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Dengan sinergi antara perencanaan anggaran yang presisi dan pelaporan kinerja yang akuntabel, Dinas Kesehatan Kota Medan berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien.

Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Dinas Kesehatan Kota Medan selaku Perangkat Daerah telah mengamatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kota Medan juga berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Melalui regulasi inilah, Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan penyusunan anggaran yang tidak terlepas dari

perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra tersebut memberikan gambaran mengenai visi, misi, dan sasaran strategis organisasi dalam kurun waktu lima tahun, yang kemudian diimplementasikan ke dalam anggaran berbasis kinerja melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, hingga penetapan rencana kerja tahunan, Perjanjian Kinerja, serta rencana anggaran setiap tahunnya. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran yang disusun telah terarah pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran telah berjalan dengan baik, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 merupakan turunan langsung dari sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra. Hal ini terlihat dari keterkaitan antara indikator kinerja dengan program prioritas seperti peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan cakupan jaminan kesehatan (UHC), serta penanganan stunting.

Dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan, Dinas Kesehatan Kota Medan menetapkan setiap program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta isu strategis di bidang kesehatan. Program-program yang dilaksanakan mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang didukung oleh kebijakan yang kuat serta kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2024, misalnya, terdapat program peningkatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan sanitasi lingkungan yang menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah.

Penetapan indikator kinerja dilakukan melalui penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator tersebut antara lain meliputi prevalensi stunting, cakupan jaminan kesehatan, indeks kepuasan masyarakat, serta persentase puskesmas terakreditasi. Pada

tahun 2023, sebagian besar indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, seperti cakupan UHC yang mencapai 98,28% dari target 97% serta peningkatan indeks kesehatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (target) dan realisasi kinerja (hasil) setiap indikator. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2023 berada pada kategori “sangat baik” dengan rata-rata capaian sebesar 134,76%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan secara berkelanjutan dengan membandingkan capaian kinerja antar tahun serta dengan target jangka menengah dalam Renstra. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam aspek pelaporan, Dinas Kesehatan Kota Medan menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, serta analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2023, realisasi anggaran mencapai sekitar 87,88% dari total anggaran yang dialokasikan, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Pada tahun 2024, penerapan anggaran berbasis kinerja semakin diperkuat melalui evaluasi internal secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di setiap unit kerja. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya, sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti validasi data dan optimalisasi sumber daya yang perlu terus diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi di masa yang akan datang.

Kendala Dalam Penerapan penganggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, Dinas Kesehatan Kota Medan masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian kinerja program dan kegiatan. Salah satu kendala utama adalah permasalahan validasi data kependudukan, khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketidaksesuaian data ini berdampak pada kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan, sehingga dapat menghambat akses pelayanan kesehatan yang seharusnya diterima masyarakat.

Selain itu, terdapat peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari wilayah sekitar Kota Medan. Kemudahan akses pelayanan kesehatan menyebabkan banyak masyarakat dari luar daerah memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Medan, sehingga menambah beban pelayanan dan berdampak pada perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kendala berikutnya adalah meningkatnya beban anggaran daerah, khususnya dalam pembiayaan premi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peningkatan jumlah peserta JKN secara signifikan menyebabkan anggaran yang dialokasikan dari APBD juga semakin besar, sehingga menuntut

pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Dari sisi internal organisasi, terdapat kendala berupa beban kerja ganda pada tenaga kesehatan, terutama di puskesmas. Tenaga kesehatan tidak hanya menjalankan tugas pelayanan medis, tetapi juga dibebani dengan pekerjaan administrasi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program berbasis kinerja.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem rujukan kesehatan, termasuk kendala yang terjadi pada pihak BPJS, juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi antar pihak terkait dalam mendukung pencapaian kinerja.

Kendala lainnya adalah terbatasnya layanan kesehatan dan faktor pengetahuan masyarakat, terutama dalam kasus stunting. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gizi serta masih terbatasnya akses layanan kesehatan di beberapa wilayah menjadi faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja di bidang kesehatan masyarakat.

Secara umum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial masyarakat, dinamika kependudukan, serta sistem administrasi dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di masa mendatang.

Solusi Dalam Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Medan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan anggaran berbasis

kinerja, Dinas Kesehatan Kota Medan perlu melakukan berbagai langkah strategis yang berorientasi pada perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja.

Salah satu solusi utama adalah peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis output dan outcome. Perencanaan harus dilakukan secara lebih matang dengan mengaitkan setiap program pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan bahwa penganggaran harus berbasis pada program yang memiliki hasil nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Selanjutnya, diperlukan penguatan sistem pengelolaan dan integrasi data kesehatan. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam pengambilan keputusan anggaran berbasis kinerja. Pemerintah mendorong pembangunan sistem monitoring berbasis digital dan dashboard untuk memastikan ketersediaan data secara real-time sehingga perencanaan dan evaluasi dapat dilakukan secara tepat.

Solusi berikutnya adalah peningkatan efisiensi dan prioritas penggunaan anggaran. Pengalokasian anggaran harus difokuskan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dasar, penurunan stunting, dan peningkatan cakupan jaminan kesehatan. Prinsip utama dalam anggaran berbasis kinerja adalah bukan pada besarnya anggaran, tetapi pada ketepatan alokasi dan keberlanjutannya. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, workshop, dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang perencanaan dan penganggaran. SDM yang kompeten akan mampu menyusun indikator kinerja yang tepat serta melakukan evaluasi secara akurat terhadap capaian program. Upaya ini juga dapat mengurangi kesalahan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Dinas Kesehatan juga dapat

menerapkan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan dengan pihak swasta melalui skema seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Model ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta mengurangi beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan.

Selanjutnya, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pelayanan kesehatan. Digitalisasi seperti penggunaan sistem rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi beban administrasi tenaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Medan perlu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, akan tercipta siklus manajemen kinerja yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Terakhir, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program kesehatan dan sistem pelayanan. Partisipasi masyarakat yang baik akan mendukung keberhasilan program serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, solusi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja menekankan pada perbaikan kualitas perencanaan, penguatan data dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Dengan penerapan solusi tersebut, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Medan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas

Kesehatan Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan strategis (Renstra), pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja melalui LKjIP. Selain itu, realisasi anggaran yang mendekati target serta penurunan selisih anggaran dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan peningkatan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Capaian indikator kinerja yang sebagian besar memenuhi bahkan melampaui target, seperti peningkatan indeks kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC), serta penurunan prevalensi stunting, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah berorientasi pada hasil (outcome) dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi dalam PBK telah mulai terwujud.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi permasalahan validasi data kependudukan, peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, meningkatnya beban anggaran JKN, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, meskipun penerapan penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Medan telah menunjukkan kinerja yang baik, masih diperlukan perbaikan dan penguatan pada beberapa aspek agar implementasinya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan..

Kinerja Pada Kantor Kecamatan Bahorok Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7 (2).

Supyani, Khaerul Umam. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*. 2 (3).

Humas BKPK. (2023). Penguatan Anggaran Kesehatan Berbasis Kinerja Melalui UU Kesehatan.

Erin Astuti. (2024). Kunci Sukses KPBU Sektor Kesehatan: Pelajaran Berharga Dari Proyek KPBU Sektor Kesehatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kota Medan (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). 1-110.
- Pemerintahan Kota Medan (2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1-8.
- Dinas Kesehatan Kota Medan (2023). Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan. 1-35.
- Mustaqiem Arja, Oktarini Khamilah Siregar. (2025). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis